

Kajian Yuridis Terhadap Perampasan Aset Oleh Negara Hasil Tindak Pidana
Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus
Putusan Kasasi No: 3096 K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan Banding No :
195/Pid/2018/PT.Bdg Jis Putusan Pengadilan Negeri Depok No:
83/Pid.B/2018/PN.Dpk)

Vira Sintia

1687055

Abstrak

Penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan agar keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan asal dapat ditelusuri secara maksimal dan dikembalikan kepada yang berhak. Salah satu putusan kasasi yang menimbulkan kontroversial adalah perampasan aset First Travel oleh negara.

Masalah hukum dalam penelitian ini yaitu apakah putusan kasasi tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat? Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan korban setelah adanya putusan kasasi tersebut?

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan aset First Travel dirampas oleh negara adalah dikarenakan Pengurus Pengelola Aset Para Korban menolak pengembalian aset tersebut. Undang-undang secara normatif memprioritaskan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada yang berhak. Negara tidak berhak menerima aset First Travel karena tidak ada hubungannya dengan keuangan negara yang dirugikan, akan tetapi para korban lebih berhak karena aset tersebut berasal dari uang yang mereka setorkan ke First Travel untuk umroh sehingga keadilan restoratif dapat terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengajukan gugatan *class action* ataupun *citizen lawsuit*, permohonan perubahan status aset melalui instansi terkait. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu penegak hukum harus berani untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum dalam hukum acara agar tujuan hukum bagi masyarakat tercapai.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Penemuan Hukum, Perampasan Aset

A Juridical Study on Asset Confiscation by State of Money Laundering Crimes is linked to Justice for The Victims (Study Case: Cassation Decree No: 3096 K/Pid.Sus/2018 Jo Appeal Decree No : 195/Pid/2018/PT.Bdg Jis District Court of Depok Decree No: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk)

Vira Sintia

1687055

Abstract

The implementation of the Money Laundering Prevention and Eradication Act is intended to allow the profit gained from an original crime to be traced to the fullest and returned to the right. One of the cassation decree that raises controversial is the confiscation of First Travel assets by the state.

The legal problem in this research is whether the decree of the cassation is correct and fulfill the sense of community justice? What the efforts can be sacrificed by the victims after the decree?

The judgement of the judges in deciding that the First Travel asset is confiscated by the state is because the asset manager of the victims refuses to return the asset. The law is normatively prioritizing evidence at the proceeding to the court. The state does not have the right to receive First Travel assets because it has nothing to do with the state finances that are harmed, but the victims are more entitled because the assets come from the money they deposited to First Travel for the umrah and restorative justice can be fulfilled. The efforts can be made included submitting a class action lawsuit or citizen lawsuit, an application for changes in asset status through relevant agencies. Conclusions obtained based on the results of research i.e. law enforcement should dare to make a breakthrough or legal finding in the procedural law so that the legal purpose for society is achieved.

Keywords : Restorative Justice, Legal Finding, Asset Confiscation

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Persetujuan Revisi.....	ii
Pengesahan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iv
Pernyataan Laporan Penelitian.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kasus Posisi.....	11
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	19
B. Tinjauan Teoritik	
1. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2. Perampasan Aset dan Pengembalian Aset.....	26
3. Teori Kepastian Hukum.....	31
4. Teori Keadilan.....	33
5. Teori Kemanfaatan.....	36
6. Kerugian Keuangan Negara.....	37

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

- A. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.....39
- B. Putusan Banding Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg.....57
- C. Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018.....59

BAB IV ANALISIS KASUS DAN PUTUSAN

- A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan Banding Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg Jis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B./2018/PN.Dpk Terkait Perampasan Aset Oleh Negara.....65
- B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Korban Calon Jemaah First Travel Pasca Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan Banding Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg Jis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B./2018/PN.Dpk Agar Mendapatkan Keadilan Terhadap Penggantian Kerugian Bagi Korban.....88

BAB V PENUTUP

- SIMPULAN.....101
- Daftar Pustaka.....103
- Lampiran.....107
- Curriculum Vitae.....109

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.....	107
Lampiran II Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018.....	108

